

## PERAN KELEMBAGAAN LOKAL ADAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

Wedy Nasrul

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Jalan Pasir Kandang No. 4 Padang  
E-mail: wedy72nasrul@gmail.com

Diterima 30 April 2012 / Disetujui 14 Maret 2013

**Abstract:** *The role of public and institute in development of countryside is not only limited to beneficial owner, but actively involved direct in development programs. Condition of local institute of custom here and now will affect to the role in development of countryside. Purpose of fundamental of this research description the role of local institute of custom in development of countryside. This research applies qualitative method with case study in Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam. Data collecting is done qualitatively, that is direct observation or observation, in-depth interview and documentation. Research finding indicates that as result of governmental intervenes to government of nagari from time to time indirectly makes the role of local institute of custom on the wane in development of countryside. The role of local institute of custom in development of nagari still there is in each development step countryside, where a real role dominance is at planning stage and coordination.*

**Keywords:** *local institute of custom, development of countryside, government of nagari, conservation*

**Abstrak:** *Peran masyarakat dan lembaga di dalam pembangunan pedesaan tidak hanya terbatas pada pemilik manfaat, tapi secara aktif juga terlibat langsung dalam program pembangunan. Kondisi lembaga adat lokal sekarang akan mempengaruhi perannya dalam pembangunan pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, yaitu pengamatan langsung atau observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan, akibat campur tangan pemerintah terhadap pemerintah nagari dari waktu ke waktu secara tidak langsung membuat peran lembaga lokal adat semakin berkurang dalam pembangunan pedesaan. Peran lembaga lokal adat dalam pembangunan nagari masih ada di setiap langkah pengembangan pedesaan, di mana dominasi peran nyatanya adalah tahap perencanaan dan koordinasi.*

**Kata kunci:** *lembaga lokal adat, pembangunan desa, pemerintah nagari, konservasi*

### PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, mengingat kawasan pedesaan yang masih dominan (82 persen wilayah Indonesia adalah pedesaan) dan sekitar 50 persen penduduk Indonesia masih tinggal di kawasan pedesaan. Pada tahun 2008 terdapat 67.245 desa dan hanya 7.893 kelurahan (BPS, 2008). Arti penting

pembangunan pedesaan adalah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan antarkawasan dan kepentingan umum dalam kawasan pedesaan, dan kepentingan umum dalam kawasan pedesaan secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat (Permen Dalam Negeri 51/2007).

Dalam pembangunan desa/nagari, hal yang perlu diketahui, dipahami dan diperhatikan adalah berbagai kekhususan yang ada dalam masyarakat pedesaan. Tanpa memperhatikan adanya kekhususan tersebut mungkin program pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Kekhususan pedesaan yang dimaksud antara lain adalah bahwa masyarakat desa relatif sangat kuat keterikatannya pada nilai-nilai lama seperti budaya/adat istiadat maupun agama. Nilai-nilai lama atau biasa disebut dengan budaya tradisional itu sendiri menurut Dove (1985) sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat pada tempat di mana budaya tradisional tersebut melekat.

Lembaga/organisasi lokal merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan desa. Tanpa adanya institusi/kelembagaan lokal, ditambah dengan birokrasi serta partisipan, infrastruktur tidak akan dapat dibangun atau dipertahankan. Jasa pelayanan masyarakat tidak dapat dilakukan sementara itu teknologi yang sesuai tidak akan dapat ditempatkan secara maksimal dan pemerintah tidak akan dapat memelihara atau mempertahankan arus informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian kelembagaan lokal merupakan faktor dominan, terutama dalam menggerakkan partisipasi. Sesungguhnya aktivitas partisipasi masyarakat itu dapat didorong atau dirangsang oleh prakarsa pemerintah atau karena prakarsa sendiri (Esman dan Uphoff, 1988).

Di Provinsi Sumatera Barat semasa sistem pemerintahan desa kelembagaan lokal khususnya kelembagaan lokal adat secara normatif pernah diberikan wewenang sebagai penyelenggara musyawarah pembangunan desa. Melalui Instruksi Gubernur Sumatera Barat 12/1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Nagari (sebutan lain dari desa di Sumatera Barat) diselenggarakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan diikuti oleh seluruh aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan, anggota KAN, dan masyarakat nagari bersangkutan. Musbang Nagari dimaksudkan sebagai wadah untuk merumuskan rencana pembangunan pedesaan yang sesuai dengan aspirasi *Anak Nagari* serta sebagai wadah untuk mengevaluasi

perkembangan Pembangunan Nagari.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2/2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagai sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang baik dan efektif di daerah, dimana partisipasi masyarakat dapat dikembangkan lebih luas, tidak terbatas sebagai pelaksana dan penerima manfaat dari program pengembangan masyarakat, tetapi secara aktif dapat terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program-program pembangunan yang akan dilakukan. Untuk terealisasinya hal tersebut diperlukan peran aktif dari berbagai kelembagaan yang ada di nagari, terutama yang dapat mewadahi aspirasi masyarakat serta melakukan evaluasi dan kontrol atas pelaksanaan berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintahan nagari.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan penelitian tidak membuat perlakuan, dalam mengumpulkan data bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti (Sugiyono, 2008). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, analisis data yang dilakukan tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada) melainkan berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antarvariabel (Wirartha, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran KAN dalam Pembangunan Nagari Sungai Pua.

Peran adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok berdasarkan kedudukan dan fungsinya secara normatif di dalam masyarakat (Soekanto, 1987; Thoha, 1993; Suhardono;1994). Dalam kegiatan pemba-

ngunan Nagari Sungai Pua yang terlibat dan berperan dalam pembangunan tidak saja pemerintah nagari, akan tetapi seluruh lembaga-lembaga lokal dan masyarakat dinagari.

Terdapat 2 (dua) bentuk peran lembaga KAN dalam pembangunan Nagari Sungai Pua. Pertama adalah peran yang langsung dilakukan oleh lembaga KAN sesuai fungsinya sebagai mitra dari pemerintah dalam pembangunan nagari. Sehingga peran KAN hanya memberikan masukan dan saran dalam proses pembangunan nagari, bukan sebagai pengambil kebijakan atau penyelenggara dalam pembangunan Nagari Sungai Pua. Seperti halnya Musyawarah Pembangunan Nagari Sungai Pua di selenggarakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sedangkan draf rencana pembangunan disusun oleh Pemerintahan Nagari bersama LPMN. Seterusnya Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah di rumuskan kebijakannya oleh Walinagari bersama Badan Musyawarah Nagari (BAMUS). Saran dan masukan yang diberikan KAN dalam pembangunan nagari dilakukan dalam rapat-rapat yang membahas tentang pembangunan nagari. Kebijakan yang dapat diambil oleh KAN dalam pembangunan nagari ketika program-program pembangunan tersebut berkaitan dengan masalah adat seperti tanah ulayat, sako, dan pusako atau program-program pembangunan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma adat yang berlaku di Nagari Sungai Pua. Dalam hal ini biasanya Walinagari atau pelaksana pembangunan akan mengkoordinasikannya terlebih dahulu kepada KAN atau Ketua KAN.

Peran kedua KAN dalam pembangunan nagari adalah peran tidak langsung yang dilakukan oleh KAN melalui *Niniak Mamak/Penghulu* yang merupakan anggota dari KAN itu sendiri. Peran *Niniak Mamak* dalam pembangunan Nagari Sungai Pua tak lepas dari ketokohan dan penghargaan dari *Niniak Mamak* yang secara adat (informal) adalah pemimpin di nagari. Atau terdapatnya perwakilan KAN atau unsur KAN dalam beberapa lembaga yang terlibat langsung dalam pembangunan nagari seperti BAMUS dan LPMN. Peran yang sangat penting dilakukan oleh *Niniak Mamak* adalah

dalam menggalang partisipasi *anak kamanakan/masyarakat* di nagari untuk mau terlibat dalam pembangunan nagari. Akan tetapi tidak seluruh *Niniak Mamak* yang ada di nagari berperan aktif dalam pembangunan Nagari Sungai Pua. Para *Niniak Mamak* yang masih tinggi tingkat ketokohan dan pengaruhnya yang sangat berperan dalam pembangunan nagari.

Peran langsung dilakukan oleh lembaga KAN dalam pembangunan lebih banyak terdapat pada tahap perencanaan dan koordinasi, terutama untuk pembuatan produk hukum, peningkatan pembangunan infrastruktur dan prasarana umum. Kegiatan ini biasanya akan melibatkan banyak unsur lembaga dan masyarakat, sehingga perlu diselaraskan kepentingan-kepentingan dan masalah yang mungkin terjadi. KAN sebagai lembaga adat tertinggi akan dapat menengahi permasalahan dan menyelaraskan kepentingan yang mungkin terjadi dalam tahap perencanaan serta yang telah terjadi pada tahap koordinasi.

Peran tidak langsung KAN melalui *Niniak Mamak* lebih banyak terdapat pada tahap pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap pelaksanaan *Niniak Mamak* akan mengajak *anak kamanakan* untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Pada tahap pengawasan *Niniak Mamak* akan mengawasi jalannya kegiatan dan keterlibatan *anak kamanakan* yang terlibat sehingga kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Peran KAN dan *Niniak Mamak* secara bersamaan juga terdapat dalam tahapan pembangunan, seperti dalam perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi seperti dalam kegiatan penanggulangan masalah kemiskinan, adat dan kegiatan menjalin kerjasama dengan perantau. KAN bersama *Niniak Mamak* yang ada di nagari dan dirantau akan sama-sama terlibat dalam setiap tahapan kegiatan ini.

**(1) Perencanaan Pembangunan.** Dalam pelaksanaan Musrenbang Nagari, semua unsur di nagari Sungai Pua diundang untuk terlibat dalam merumuskan perencanaan pembangunan nagari. Dalam perencanaan pembangunan Nagari Sungai Pua, KAN diundang sebagai lembaga tinggi adat nagari dan juga sebagai *Niniak Mamak (badan tampatan* di Jorong). KAN atau *Niniak Mamak* memberikan masukan

terhadap usulan-usulan pembangunan yang diajukan oleh peserta rapat, bahwa kegiatan yang diusulkan terkadang akan bersinggungan dengan norma, adat istiadat yang berlaku di Nagari Sungai Pua. Selain itu, untuk setiap kegiatan yang direncanakan berkaitan dengan tanah ulayat maka KAN juga akan memberikan solusi-solusi sehingga pembangunan tetap dapat dilaksanakan. Ungkapan *pai tampek batanyo* (bertanya sebelum mengerjakan) sering dilakukan unsur pemerintahan dan pelaksana pembangunan kepada KAN dan *Niniak Mamak* pada tahap perencanaan pembangunan tingkat nagari ini.

**(2) Pelaksanaan Pembangunan.** Pada tahap pelaksanaan pembangunan di Nagari Sungai Pua, baik itu pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, maupun pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia, secara tidak langsung KAN yang diwakili oleh *Niniak Mamak* memiliki peran dalam pelaksanaan pembangunan di nagari Sungai Pua.

Lembaga KAN tidak terlibat secara fisik karena KAN adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan mufakat adat tertinggi. Seterusnya *Niniak Mamak* secara kepemimpinan adat KAN diibaratkan "*kayu gadang*", *ureknyo tampek baselo*, *dahannyo tampek balinduang*, *batangnyo tampek basanda* (kayu besar, akarnya tempat bersila, dahannya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar) artinya *Niniak Mamak* sebagai anggota KAN adalah pemimpin dalam kaumnya, pimpinan dalam nagari yang mengayomi anak kemenakan yang dibawah perintahnya (Samin et al 1996).

*Niniak Mamak* dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Pua berperan dalam mengajak dan memerintahkan *anak kamanakan*/masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan nagari. Dalam kewenangan terhadap masyarakat, pemerintahan nagari punya masyarakat sedangkan masyarakat adalah kemenakan dari *Mamak/Niniak Mamak*. Pengaruh *Niniak Mamak* terhadap kemenakan sangat kuat di Nagari Sungai Pua, terdapat istilah *disuruah pai ditagah baranti* (jika diperintah harus dikerjakan jika dilarang harus berhenti atau ditinggalkan) atau *kamanakan saparintah mamak*. Kedua ungkapan

di atas menggambarkan kekuasaan *Niniak Mamak* terhadap kemenakan tidak dapat dibantahkan, apapun keputusan yang digariskan oleh *Niniak Mamak* maka anak kemenakan harus dilaksanakan tidak boleh membantah apalagi melanggar.

Peran *Niniak Mamak* yang besar dalam mengajak *anak kamanakan* untuk terlibat dalam pembangunan nagari, dimanfaatkan Walinagari untuk mengerahkan *anak kamanakan* untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan nagari. Jika *Niniak Mamak* tidak dilibatkan maka *anak kamanakan* juga tidak akan mau mengerjakan dan melaksanakannya. Laporan pembangunan Nagari Sungai Pua tahun 2007 dari total 6,4 milyar rupiah biaya pembangunan di Nagari Sungai Pua 33,88% atau sekitar 2,1 milyar rupiah adalah sumbangan dari masyarakat. Pada tahun 2008 meningkat menjadi 57,88 % dengan jumlah dana 5,1 milyar rupiah, lebih banyak dari dana yang diberikan oleh pemerintah sebesar 3,7 milyar rupiah (42,6%).

**(3) Koordinasi.** KAN adalah mitra dari pemerintahan nagari dalam pembangunan Nagari Sungai Pua, sehingga KAN cukup berperan dalam tahap koordinasi pembangunan di Nagari Sungai Pua. Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan oleh lembaga pelaksana pembangunan sendiri, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) maupun pemerintahan nagari atau Walinagari. Koordinasi yang dilakukan hampir pada setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Nagari Sungai Pua. Pembangunan Nagari Sungai Pua melibatkan seluruh masyarakat nagari. Masyarakat yang tinggal di nagari, di sekitar nagari dan di rantau. Agar pembangunan nagari berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memenuhi kepentingan seluruh warga masyarakat, peran KAN sangat dibutuhkan dalam mengkoordinasikan proses, tujuan dan manfaat tiap-tiap program pembangunan yang dilaksanakan. Koordinasi juga diperlukan agar pembangunan yang dilakukan tidak berbenturan dengan norma-norma adat dan agama yang berlaku di Nagari Sungai Pua.

Hubungan kerja antara lembaga (KAN, BAMUS dan Pemerintahan Nagari) serta banyaknya lembaga yang terlibat dalam pembangunan

nagari juga perlu dikoordinasikan. KAN adalah lembaga yang dipercayai dalam menyelaraskan kepentingan-kepentingan antarlembaga tersebut, sehingga konflik-konflik kepentingan dapat dihindarkan.

**(4) Pengawasan.** Dalam tahapan pengawasan pembangunan, peran KAN secara tidak langsung dilakukan oleh *Niniak Mamak*. Karena *Niniak Mamak* lebih dekat dengan objek-objek atau kegiatan pembangunan. Pengawasan lebih banyak dilakukan dalam pembangunan yang bersifat fisik dan pembangunan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan adalah terhadap akuntabilitas dan transparansi kegiatan pembangunan, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan baik terhadap tujuan pembangunan maupun akibat pembangunan, seperti terhadap agama dan adat istiadat.

Pengawasan yang dilakukan KAN dan *Niniak Mamak* terhadap pembangunan nagari Sungai Pua juga dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan nagari. Seperti terjadi silang sengketa antara *anak kamanakan* dengan pemerintahan nagari atau pihak ketiga sebagai pelaksanaan pekerjaan pembangunan. KAN dan *Niniak Mamak* akan memanggil kaum atau *anak kamanakan* yang bermasalah, sampai dicarikan solusi dan jalan yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Fatwa adat Minangkabau menyebutkan *anak dipangku kemenakan dibimbing* (anak dipangku kemenakan dibimbing) dimana *Niniak Mamak* punya kewajiban memberikan pengarahan dan penyelesaian yang bijaksana, agar yang kusut menjadi selesai, yang keruh menjadi jernih. (Rivai Abu (1983) dalam Samin *et al* 1996). Ungkapan lain yang juga sering diberikan kepada KAN terhadap perannya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pembangunan yaitu dijadikannya KAN atau *Niniak Mamak* sebagai *pai tampek batanyo, pulang tampek babarito* dimana jika terjadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan KAN merupakan tempat mengadakan persoalan yang timbul, agar diperoleh jalan penyelesaiannya.

**(5) Evaluasi.** KAN tidak begitu terlibat dalam proses evaluasi pembangunan di Nagari Sungai Pua. Evaluasi lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait yang telah

ditunjuk dalam kegiatan evaluasi, seperti pemerintah kecamatan. KAN berperan dalam tahapan evaluasi hanya pada kegiatan-kegiatan pembangunan yang berkaitan langsung dengan KAN, seperti masalah adat dan pusako. Evaluasi dilakukan KAN melalui *Niniak Mamak* terhadap program yang terkait langsung dengan masyarakat khususnya masyarakat miskin, karena *Niniak Mamak* adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Evaluasi juga dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dari program yang dilaksanakan, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan, maka *Niniak Mamak* akan menyampaikannya kepada pemerintahan nagari. Pemerintahan nagari atau pelaksana pembangunan (*anak kamanakan*) biasanya akan memperbaiki sesuai saran *Niniak Mamak* tersebut karena karena di Nagari Sungai Pua *anak kamanakan* sangat menghargai *Niniak Mamak*nya. Seperti dalam pembangunan pariwisata, ketika akan berdampak terhadap lingkungan dan moral remaja maka dibuat aturan yang khusus untuk ini.

#### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Pembangunan Nagari Sungai Pua**

Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

**Faktor Internal.** Faktor internal ini terdapat beberapa poin yang mempengaruhi peran KAN dalam pembangunan Nagari Sungai Pua, diantaranya adalah;

1) *Tingkat kesadaran pengurus KAN/Niniak Mamak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.* Lembaga KAN nagari Sungai Pua telah membentuk susunan kepengurusan Kerapatan Adat Nagari satu kali tiga tahun, dimana susunan kepengurusan KAN diambil berdasarkan hasil rapat anggota KAN nagari Sungai Pua. Susunan kepengurusan KAN terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Pengurus serta serta badan tapatan KAN yang terdapat di Jorong-Jorong. Ketika susunan kepengurusan telah terbentuk, ada beberapa dari *Niniak Mamak* yang terlibat dalam kepengurusan tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Hal ini dikarenakan *Niniak Mamak* tersebut pergi merantau keluar daerah Sungai Pua

karena sesuatu hal. Kejadian seperti ini, dapat mempengaruhi peran KAN dalam menjalankan fungsinya. Meskipun nantinya kasus seperti ini dapat ditanggulangi oleh pengurus inti KAN seperti ketua KAN, akan tetapi tidak secara maksimal dapat dilakukan.

2) **Kualitas dan Pengelolaan SDM.** Keanggotaan KAN yang terdiri dari *Niniak Mamak* menjadi contoh dan panutan dalam masyarakat nagari. Anak kemenakan amat segan kepada *Niniak Mamaknya*, bahkan ia akan lebih patuh kepada *Niniak Mamak* dari pada perangkat pemerintah di nagari. Ini bukan berarti rendahnya kharismatik pemerintah nagari dibanding kharismatik seorang *Niniak Mamak*. *Niniak Mamak* adalah ibarat kayu baringin di tengah koto, batangnya tampek basanda, daunnya tampek balinduang, ureknya tampek baselo, kok pai tampek batanyo, kok pulang tampek babarito (*Niniak Mamak* diibaratkan kayu baringin ditengah koto, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat berlindung, uratnya tempat bersila/duduk, kalau pergi tempat bertanya, kalau pulang tempat membawa berita). Untuk menjadi *Niniak Mamak* harus mempunyai bekal ilmu dan pengalaman yang amat banyak dalam bidangnya. Terkait dengan pembangunan nagari KAN juga harus memahami dan mengerti tentang proses dan tahapan dalam pembangunan Nagari. Apalagi dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi saat ini, pengaruh budaya luar yang positif maupun negatif sangat cepat masuk ke nagari. Sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat juga akan sangat mudah berubah.

**Faktor Eksternal.** Di dalam faktor eksternal ini terdapat beberapa poin yang mempengaruhi peran KAN dalam pembangunan Nagari Sungai Pua, di antaranya adalah ;

1) **Hubungan Pemerintahan Nagari dengan KAN.** Fungsi KAN dalam pembangunan nagari adalah sebagai mitra pemerintahan nagari (Perda Kabupaten Agam 12/2007). Hubungan baik pemerintahan nagari dengan KAN akan memudahkan proses koordinasi kedua lembaga dalam pelaksanaan pembangunan. KAN sebagai lembaga adat adalah lembaga informal tertinggi di nagari. Pemerintah nagari mempunyai kewenangan terhadap masyarakat, akan tetapi masyarakat termasuk Walinagari adalah

*anak kamanakan* dari *Niniak Mamak*. Hubungan baik pemerintahan nagari dengan KAN secara adat (antara mamak dan kemenakan) maupun secara kelembagaan nagari menjadi faktor yang saling mempengaruhi dan menentukan dalam pembangunan nagari Sungai Pua. Pemerintahan Nagari terlebih dahulu melakukan pembicaraan kepada KAN jika terdapat permasalahan dalam kegiatan pembangunan, sehingga dalam pertemuan formal tidak terjadi perdebatan antara Pemerintahan Nagari dengan KAN, bahkan KAN akan ikut serta menyelesaikannya.

2) **Citra KAN di Nagari Sungai Pua.** KAN bersama *Niniak Mamak* sebagai pimpinan informal di nagari menjalankan tugas dan fungsinya di dalam garis alur dan patut. *Niniak Mamak* yang keluar dari garis alur dan patut akan menerima hukuman berbentuk tidak di bawa *sehilir-semudik*, masuk *tak genap*, keluar *tak ganjil* (tidak diajak). Bagi *Niniak Mamak* hukuman tersebut amatlah ditakuti, bahkan lebih di takuti dari hukum buang.

3) **Hubungan antara lembaga yang terdapat di Nagari Sungai Pua.** Hubungan antar lembaga yang terdapat di nagari Sungai Pua juga mempengaruhi peran KAN dalam pembangunan Nagari Sungai Pua. Di nagari Sungai Pua terdapat beberapa kelembagaan yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut ada yang dibentuk secara adat seperti *urang tigo jinih* atau *tungku tigo sajarangan*. Lembaga-lembaga adat ini mempunyai kewenangan dan deskripsi kerja yang jelas seperti diungkapkan pepatah berikut: '*penghulu taguah di adat, alim ulama taguah di agamo, cadiak pandai taguah dek buek* (penghulu setia pada adat, alim ulama setia pada agama, cerdik pandai setia pada aturan/perundangan).

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peran KAN dalam pembangunan Nagari Sungai Pua berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan penelitian. Faktor-faktor ini termasuk kedalam faktor eksternal yang mempengaruhi peran KAN dalam pembangunan Nagari Sungai Pua, diantaranya adalah; a) Masih terpeliharanya adat istiadat dengan baik di Nagari Sungai Pua, yang

menempatkan KAN/*Niniak Mamak* sebagai pemimpin informal di nagari; b) Konsep pembangunan di nagari Sungai Pua adalah pembangunan partisipatif, pemerintahan nagari membutuhkan peran *Niniak Mamak* yang terdapat di nagari Sungai Pua untuk mengalang partisipasi masyarakat untuk terlibat secara penuh dalam pembangunan nagari; c) Adanya hubungan kekeluargaan dan rasa persaudaraan diantara para pemimpin lembaga yang ada di Nagari Sungai Pua, sehingga menimbulkan rasa saling menghargai dan keinginan untuk sama-sama berperan dalam setiap kegiatan dan pembangunan nagari.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Peran KAN dalam pembangunan Nagari. Terdapat 2 (dua) bentuk peran KAN dalam pembangunan Nagari Sungai Pua; a) Peran yang langsung dilakukan oleh lembaga KAN sesuai fungsinya dalam pembangunan nagari. Sebagai lembaga adat KAN berperan dalam memberikan saran dan masukan dalam rapat-rapat pembangunan nagari. Kebijakan yang dilakukan KAN jika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan adat dalam pembangunan Nagari Sungai Pua; b) Peran tidak langsung yang dilakukan oleh KAN melalui *Niniak Mamak/Penghulu* yang merupakan pemimpin secara adat di nagari.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Pembangunan Nagari Sungai Pua

a) Faktor Internal, faktor internal yang mempengaruhi peranan KAN dalam pembangunan Nagari Sungai Pua adalah; (1) Tingkat kesadaran petugas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab; (2) Kualitas dan Pengelolaan SDM.

b) Faktor Eksternal, faktor eksternal yang mempengaruhi peran KAN dalam pembangunan Nagari Sungai Pua adalah hubungan pemerintahan nagari dengan KAN, citra KAN di Nagari Sungai Pua dan hubungan antara lembaga yang terdapat di Nagari Sungai Pua.

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan

di atas, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peran KAN dalam pembangunan nagari Sungai Pua. a) Masih terpeliharanya adat istiadat dengan baik di Nagari Sungai Pua, yang menempatkan KAN/*Niniak Mamak* sebagai pemimpin informal di nagari; b) Konsep pembangunan yang ada di nagari Sungai Pua lebih mengutamakan sawadaya adalah pembangunan partisipatif dan sangat membutuhkan peran *ninik-mamak* yang terdapat di nagari Sungai Pua; c) Adanya hubungan kekeluargaan dan rasa persaudaraan diantara para pemimpin lembaga yang ada di Nagari Sungai Pua

**Rekomendasi.** 1. Agar eksistensi peran KAN dalam pembangunan nagari perobahan zaman terutama dalam era globalisasi, diperlukan dukungan pemerintah daerah dan nagari untuk menempatkan kelembagaan KAN secara normatif formal yang lebih berfungsi dalam sistem pemerintahan dan pembangunan nagari.

2. Kapasistas KAN yang masih rendah akibat latar belakang pendidikan sebagian dari *Niniak Mamak* seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintahan nagari. Karena meminta merupakan hal yang tabu bagi *Niniak Mamak* yang notabene adalah pemimpin atau anggota dalam lembaga KAN. Meningkatkan kapasistas KAN dan *Niniak Mamak* akan lebih meningkatkan peran KAN dalam pembangunan Nagari.

3. Nilai-nilai budaya yang mengatur perilaku masyarakat Nagari Sungai Pua yang membawa KAN melalui *Niniak Mamak* sangat berperan dalam pembangunan Nagari Sungai Pua, sebaiknya dijadikan sebagai elemen normatif formal di nagari. Sehingga nilai-nilai budaya ini lebih melembaga, dipamami, diturunkan dan ditaati dari generasi-kegenerasi, karena ada kekhawatiran akan terjadi perobahan dan pergeseran nilai-nilai budaya tersebut dimasa yang akan datang.

4. Peran KAN dalam pembangunan Nagari Sungai Pua tidak begitu merata pada setiap tahapan program-program pembangunan yang di ada dinagari. Agar lebih sempurnya peran KAN perlunya diberi informasi dan pengetahuan yang lebih kepada *Niniak Mamak* sebagai anggota KAN tentang tahapan dan teknis detail program-program pembangunan di Nagari Sungai Pua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, N. 2004. *Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Adat Minang Kabau. Minang Kabau yang Gelisah*. Bandung: CV. Lubuk Agung.
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga.
- Dove, M. R. 1985. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Esman, M. J. and Uphoff, N. T. 1988. *Local Organizations: Intermediaries in Rural Development*. Itacha and London: Cornell University Press.
- L. Dt. Indomo Marajo. 2000. *Pengetahuan Adat Minang Kabau*. LKAAM Sumbar.
- Putra, R. 2008. Peranan Tungku Tigo Sajaringan dalam Pembangunan Masyarakat Nagari. Studi Kasus: Nagari Pilubang Kabupaten Padang Pariaman. *Thesis Program Magister Studi Pembangunan*. ITB
- Salim, A. 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sasmojo, S. 2004. *Sains, Teknologi, Masyarakat dan Pembangunan*. Program Pascasarjana Studi Pembangunan ITB, Bandung.
- Siagian, S.P. 1994. *Manajemen Modern; Bunga Rampai*. Jakarta: CV. Masangung.
- Silalahi. 2003. *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: Citramedia.
- Sitorus, M. F. Agusta, I. 2006. *Metodologi Kajian Komunitas*, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB.
- Sri Zul Chairiyah. 2008. *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*. KP3SB.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy. 1986. *Teory Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumardjo dan Saharudin. 2006. *Tajuk Modul EP-523: Metode-metodePartisipatif dalam Pengembangan Masyarakat*. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB.
- Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syarifudin, D. 2008. Strategi Pengembangan Desa Tertinggal Wilayah Darat dan Wilayah Pesisir dalam Perspektif Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia: Wilayah Studi Kabupaten Ciamis. *Tesis S.2 Pasca Sarjana ITB*. Bandung.
- Thoha, M. 1993. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wirartha, I. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.